

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

BOYKE MEBA, S.H.
1720112005

DOSEN PEMBIMBING :
PROF. DR. ISMANSYAH, S.H., M.H.
DR. ARIA ZURNETTI, S.H., M.HUM.

**Program Kekhususan
Hukum Pidana**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)**

ABSTRAK

Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum memiliki peranan penting untuk mewujudkan *total law enforcement* agar terciptanya kesejahteraan sosial serta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Untuk melakukan *total law enforcement*, pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan hukum sebagai landasan normatif dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana baik secara penal maupun non penal. Akan tetapi, kebijakan hukum pidana yang dibentuk tidak dapat menekan pertumbuhan angka tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Hal tersebut menarik untuk dikaji dengan memperhatikan permasalahan terkait dengan bentuk penegakan hukum tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak dan upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan melakukan wawancara serta mengolah data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kelemahan substansi hukum terkait dengan tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak dan faktor budaya masyarakat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang kurang memahami tentang hukum dan hukuman, menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak. Selain itu, lembaga sosial seperti lembaga P2TP2A yang bersifat pasif dalam melakukan perlindungan terhadap anak akan berdampak pada tingginya angka tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah dapat mengoptimalkan substansi hukum terkait dengan perlindungan anak dengan lebih menekankan upaya preventif dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, serta diharapkan lembaga sosial di daerah lebih bersifat aktif dalam melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak Korban, Anak pelaku

**LAW ENFORCEMENT FOR SEXUAL OFFENCE COMMITTED BY
CHILDREN AGAINST CHILDREN
(Study at Prosecutor Office In Pesisir Selatan District)**

ABSTRACT

Legal substance, legal structure, and legal culture have an important role in realizing total law enforcement in order to create social welfare and justice, certainty, and benefit of law. To establish the total law enforcement, the government has formed various legal policies as a normative basis in tackling crime by imposing either penalty or non penalty. However, the legal policies cannot suppress the growth of the number of sexual offence committed by children against children because of various causes. Based on the problem above, it is interesting to study especially related to the form of law enforcement of the sexual crime committed by children against children and regarding the efforts to deal with the sexual crime on children. The method used in this research was an empirical juridical law research, which was carried out with library research. In collecting the data, the research used interview and secondary data obtained from primary and secondary law materials. The finding of this research indicates that the various causes of the sexual offences committed against and by children are legal substance and legal culture such as lack of understanding of the law and punishment. In addition, social institution such as the central agency for the empowerment of women and children which is passive in protecting children has an impact on the high rate of sexual crime committed by children against children. Therefore, it is expected that the government can optimize the legal substance related to children protection by emphasizing preventive efforts in carrying out law enforcement of sexual offence committed by children against children. It is also expected that social institution in the region will be more active in carrying out the activities of child protection.

Keywords : *Law enforcement, sexual offence, children as victims, children as perpetrators*